

Analisis Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Masriani¹⁾, Fadly Yashari Soumena²⁾

^{1,2)}Institut Parahikma Indonesia (IPI) Aisyiyah Sulawesi Selatan

¹⁾masriani090699@gmail.com , ²⁾fadly.yashari@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi syariah (PSAK Syariah) dalam laporan keuangan bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah, tantangan implementasi, serta perbandingan antar lembaga. Metode yang digunakan adalah studi dokumen, dengan data diperoleh dari laporan keuangan, literatur akademik, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bank syariah telah mengadopsi PSAK Syariah, masih terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan dan kelengkapan laporan, terutama pada penyajian informasi terkait dana zakat dan akad-akad syariah. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan SDM, sistem informasi yang belum optimal, dan perbedaan pemahaman terhadap standar syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan akuntansi syariah, harmonisasi sistem pelaporan, dan peningkatan pengawasan regulator untuk memastikan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam.

Kata kunci : Standar Akuntansi Syariah, laporan keuangan, bank syariah.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Islamic accounting standards (PSAK Syariah) in the financial statements of Islamic banks in Indonesia, focusing on their compliance with Sharia principles, implementation challenges, and interbank comparisons. The research employed a document analysis method, using data sourced from financial reports, academic literature, and relevant regulations. The findings indicate that while Islamic banks have adopted PSAK Syariah, there remain significant variations in the level of compliance and completeness, particularly in the presentation of zakat funds and Sharia-based contracts. Key challenges include limited human resources, suboptimal accounting information systems, and inconsistent understanding of Sharia standards. This study recommends strengthening Sharia accounting training, harmonizing reporting systems, and enhancing regulatory oversight to ensure transparent, accountable, and Sharia-compliant financial reporting.

Keywords : Sharia Accounting Standards, financial statements, Islamic banks.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan kebutuhan

masyarakat akan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai religious¹. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, tidak hanya menawarkan produk-produk finansial yang bebas dari riba, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan etika dalam operasionalnya. Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Standar akuntansi syariah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah².

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, munculah istilah akuntansi syariah yang menjadi penguat untuk mengatur keuangan-keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah³. Akuntansi syariah diperlukan sebagai acuan dan dasar yang mengikat terkait laporan keuangan perbankan syariah, maka pada tanggal 1 Mei 2002 dikeluarkanlah PSAK no 59 oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang terdiri dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah; dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Keuangan Syariah. Kemudian revisian PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci terkait akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad murabahah) dan PAPSII 2003 sebagai standar pengukuran⁴.

Adanya standar akuntansi syariah bank-bank syariah diharapkan dapat mengelola dan melaporkan informasi keuangan dengan cara yang lebih terstruktur yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga tersebut di mata stakeholders. Penerapan standar akuntansi syariah juga berperan dalam memperkuat posisi bank syariah di pasar global, transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting dalam menarik investor dan nasabah. Penerapan standar akuntansi syariah di bank syariah di Indonesia telah dilakukan, berbagai tantangan masih dihadapi dalam proses

¹ Rifqi Muhammad and Peni Nugraheni, "Sustainability of Islamic Banking Human Resources Through the Formulation of an Islamic Accounting Curriculum for Higher Education: Indonesian Perspective," *Sage Open* 12, no. 1 (January 2022), <https://doi.org/10.1177/21582440221079838>.

² Novandina Izzatillah Firdausi, "PDF, CDF, MGF, NORMAL BAKU DAN TABEL NORMAL," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54.

³ Idil Akbar and Endang Wulandari, "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 2 (May 12, 2023): 651–59, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.181>.

⁴ Muhammad and Nugraheni, "Sustainability of Islamic Banking Human Resources Through the Formulation of an Islamic Accounting Curriculum for Higher Education: Indonesian Perspective."

implementasinya. Salah satu masalah utama adalah tingkat kepatuhan yang bervariasi di antara bank-bank syariah, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai standar tersebut di kalangan praktisi akuntansi. Menunjukkan bahwa banyak profesional akuntansi di bank syariah belum memiliki pelatihan yang memadai mengenai standar akuntansi syariah sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan ⁵.

Terdapat perbedaan interpretasi terhadap beberapa ketentuan dalam SAS, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penyusunan laporan keuangan. Variasi dalam pemahaman dan penerapan standar akuntansi syariah ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan regulator dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan terhadap laporan keuangan bank syariah. Penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam menerapkan SAS, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai praktik akuntansi syariah di Indonesia dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah di kalangan bank syariah, serta memperkuat integritas dan reputasi sektor perbankan syariah secara keseluruhan ⁶.

Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) tantangan yang dihadapi oleh bank syariah tidak hanya terbatas, perbedaan interpretasi ketentuan, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia, sistem informasi, serta infrastruktur yang mendukung praktik akuntansi. Ketidakhahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari standar akuntansi syariah dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan pengungkapan informasi yang relevan⁷. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi akuntan dan manajer keuangan di bank syariah dapat memperburuk situasi ini, pendekatan komprehensif yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang sesuai. Harmonisasi antara

⁵ Achraf Haddad and Mohamed Naceur Souissi, "The Impact of Shariah Advisory Board Characteristics on the Financial Performance of Islamic Banks," *Cogent Economics & Finance* 10, no. 1 (December 2022), <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2062911>.

⁶ Yani Permatasari et al., "Accounting Background and Cross-Membership Effects on Investment Efficiency in Islamic Banks: A Study of Islamic Supervisory Board Members," *Journal of Financial Reporting and Accounting*, April 2024, <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2023-0429>.

⁷ Mustofa Kamal Ahmad Sagala and Nurlaila Nurlaila, "Analisis Literatur Atas Peran Akuntansi Syariah Dalam Pengungkapan Transparansi Dan Tanggung Jawab Sosial Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jesya* 8, no. 1 (January 9, 2025): 307–17, <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>.

standar akuntansi syariah dan regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar tetapi juga dapat diandalkan dan transparan ⁸.

Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) di sektor perbankan syariah merupakan suatu langkah penting dalam mewujudkan integritas dan kesesuaian antara praktik keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi standar ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana dan bersifat multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam SAS itu sendiri, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan antar lembaga keuangan syariah. Masih terdapat keterbatasan yang signifikan dalam aspek sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, terutama dalam hal pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menjadi dasar penyusunan standar akuntansi syariah. Ketidakmampuan dalam memahami prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan kesalahan yang substansial dalam pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan penyajian informasi keuangan yang relevan dan andal.

Tantangan juga muncul dari sisi infrastruktur teknologi dan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh bank syariah, yang sering kali belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik unik transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Ketidaksesuaian sistem informasi ini tidak hanya menghambat efisiensi operasional, tetapi juga berdampak pada kualitas pelaporan keuangan, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan spesifik akuntansi syariah menjadi hal yang sangat krusial. Tantangan tersebut diperparah oleh kurangnya pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan bagi para praktisi, termasuk akuntan, auditor, serta manajer keuangan di lingkungan bank syariah. Ketidaksiapan SDM dalam menghadapi kompleksitas standar akuntansi syariah dapat memperlemah keandalan laporan keuangan yang dihasilkan dan menimbulkan risiko reputasi bagi lembaga ⁹.

⁸ Alwi M. Bamhdi, "Analysis of Intangible Assets Reporting Standards and Automation in KSA within an Islamic Context – a Case Study," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, October 2024, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-0273>.

⁹ Mohammad Oudat, "ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM AND FINANCIAL SUSTAINABILITY OF COMMERCIAL AND ISLAMIC BANKS: A REVIEW OF THE LITERATURE," *SSRN Electronic Journal*, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5147108>.

Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) dalam sistem perbankan syariah merupakan upaya strategis dalam menjamin bahwa praktik pelaporan keuangan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. SAS dirancang untuk mengakomodasi karakteristik transaksi keuangan syariah yang khas, seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (spekulasi), serta penerapan prinsip keadilan dan bagi hasil. Implementasi standar ini di Indonesia maupun di berbagai yurisdiksi dengan sistem keuangan syariah yang berkembang masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan SAS adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap substansi syariah yang melandasi standar akuntansi tersebut¹⁰. Karena banyaknya mazhab fiqh dan ragam pendapat ulama, lembaga keuangan syariah dapat mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menyikapi ketentuan-ketentuan akuntansi. Pada perlakuan terhadap akad ijarah atau murabahah, terdapat variasi dalam pengakuan pendapatan serta pengakuan hak dan kewajiban dalam neraca. Perbedaan interpretasi ini, apabila tidak disertai dengan pedoman yang terstandarisasi dan bimbingan dari otoritas terkait seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penyajian laporan keuangan antar bank syariah dan menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk regulator dan investor¹¹.

Pelaporan keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam menjamin transparansi akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas lembaga keuangan syariah dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektifitas sistem pelaporan tersebut. Salah satu isu utama adalah belum adanya standar pelaporan keuangan syariah yang diterima secara universal¹². Meskipun telah tersedia pedoman dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial*

¹⁰ Radhista Notia, "COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS (BUS) AND ISLAMIC BUSINESS UNITS (UUS) AFTER THE IMPLEMENTATION OF PSAK 401," *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 11, no. 1 (April 19, 2025): 94–103, <https://doi.org/10.33197/jabe.vol11.iss1.2025.2614>.

¹¹ Bamhdi, "Analysis of Intangible Assets Reporting Standards and Automation in KSA within an Islamic Context – a Case Study."

¹² Uus Putria et al., "Peran Akuntansi Dan Penerapannya Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah Menuju Masyarakat Madani," *ISLAMICA* 8, no. 1 (2024): 35–46.

Institutions (AAOIFI) penerapannya masih terbatas dan belum diadopsi secara menyeluruh oleh seluruh intelektual. Perbedaan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah antarnegara turut memperkuat kompleksitas ini ¹³.

Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh sebagian besar lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mendukung karakteristik transaksi berbasis syariah ¹⁴. Sistem pelaporan yang ada cenderung masih mengacu pada prinsip-prinsip konvensional yang menyebabkan kesulitan dalam pencatatan transaksi seperti mudharabah dan musyarakah secara akurat. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan terutama dalam membedakan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan akad yang digunakan ¹⁵.

Pelaporan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mencerminkan kondisi lembaga keuangan serta kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah ¹⁶. Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti belum adanya standar pelaporan yang seragam secara global. Meskipun terdapat standar dari AAOIFI penerapannya belum merata karena perbedaan interpretasi syariah di berbagai negara. Selain itu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi syariah dan fiqh muamalah turut menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan substansi transaksi syariah. Lemahnya sistem informasi akuntansi yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi syariah, seperti akad bagi hasil juga menyebabkan informasi yang disajikan kurang akurat dan relevan ¹⁷.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik melalui pengumpulan data di

¹³ Ali Mutaufiq et al., *Pengantar Akuntansi Syariah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁴ Zaini Nur Aini and Lantip Susilowati, "Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing Pada e-Commerce Indonesia," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 110–26.

¹⁵ Rifqi Wahyu Pratama et al., "Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah," *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)* 2, no. 2 (2024): 139–54.

¹⁶ Sri Winarsih and Ersi Sisdianto, "Peran Laporan Keuangan Dalam Menilai Transparansi Dan Keberlanjutan Bank Syariah," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).

¹⁷ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (KITA Publisher, 2021).

lingkungan alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini tidak mengandalkan angka atau prosedur statistik, melainkan lebih menekankan pada makna dan interpretasi subjektif dari pengalaman partisipan. Ciri-ciri utama metode kualitatif meliputi penggunaan data naratif atau deskriptif (bukan angka), penekanan pada makna subjektif dari pengalaman manusia, serta pelaksanaan penelitian di lingkungan alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Selain itu, pendekatan ini bersifat fleksibel, berorientasi pada proses, dan menggunakan analisis induktif untuk menemukan pola atau tema dari data yang dikumpulkan. Peneliti juga mengutamakan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial atau budaya dari fenomena yang diteliti¹⁸.

Pendekatan deskriptif adalah metode dalam penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau objek penelitian, tanpa memanipulasi variabel yang ada. Penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang menggambarkan keadaan sebenarnya, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumen. Dalam konteks penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami perilaku, sikap, dan pengalaman partisipan berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan¹⁹.

Dalam studi mengenai penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan bank Islam pada perbankan syariah di Indonesia, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dokumen, yaitu dengan menelaah dan menganalisis laporan keuangan tahunan bank syariah, pedoman akuntansi yang berlaku (seperti PSAK Syariah), serta dokumen regulasi dari otoritas terkait seperti OJK dan Bank Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen atau pustaka, yang mencakup laporan keuangan auditan, pedoman akuntansi syariah, literatur ilmiah, dan kebijakan internal perbankan yang relevan dengan penerapan standar akuntansi²⁰.

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁹ Primadi Candra Susanto et al., "Qualitative Method Concepts: Literature Review, Focus Group Discussion, Ethnography and Grounded Theory," *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary* 2, no. 2 (September 2024): 262–75, <https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.207>.

²⁰ Arzu Meriç and Halime Karaca, "Analysis of Islamic Finance, Islamic Accounting and Standards Research," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, May 2024, <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0422>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan PSAK Syariah dalam laporan keuangan

Penerapan PSAK Syariah pada laporan keuangan bank syariah bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian informasi keuangan sesuai dengan prinsip syariah transparan dan akuntabel. PSAK Syariah mencakup berbagai aspek pelaporan seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta laporan khusus terkait dana zakat dan dana kebajikan^{21,22}

Lebih lanjut, laporan dari Tia Mutiara dan rekan (2024) menemukan bahwa meskipun entitas seperti BAZNAS sudah cukup sesuai dalam menerapkan PSAK 101 beberapa kekurangan tetap ditemukan, misalnya dalam format laporan dan ketidakhadiran laporan arus kas serta laporan perubahan ekuitas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Surade. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan PSAK di tingkat operasional masih mengalami variasi tergantung pada kesiapan internal masing-masing lembaga.

Dari sisi interpretasi penerapan PSAK Syariah tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan dapat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder, khususnya pemilik dana dan regulator. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap standar ini harus menjadi prioritas bagi seluruh unit kerja dalam lembaga keuangan syariah.

Selain itu, konsistensi dalam penerapan PSAK juga penting untuk meningkatkan daya banding antar lembaga dan kualitas informasi keuangan secara keseluruhan. Tanpa penerapan yang konsisten, laporan keuangan menjadi sulit dibandingkan dan dapat mengaburkan informasi penting bagi pengambilan keputusan. Edukasi dan pelatihan rutin kepada akuntan serta auditor syariah menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesesuaian implementasi standar.

Penerapan PSAK Syariah dalam laporan keuangan bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan bagian integral dari identitas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Ketika

²¹ Guspendri, Nasfizar, and Nita FITRIA, "Analysis of Presentation and Reporting of Financial Transactions in the Pulau Harapan Cooperative, Agam District," *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 5, no. 4 (July 2024): 780–89, <https://doi.org/10.38142/ijesss.v5i4.1107>.

²² Guspendri, Nasfizar, & FITRIA, N. (2024). *Analysis of Presentation and Reporting of Financial Transactions in the Pulau Harapan*

standar ini diterapkan secara konsisten, maka transparansi dan akuntabilitas keuangan yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan kejujuran akan lebih terwujud. Laporan keuangan syariah yang sesuai PSAK tidak hanya bermanfaat bagi regulator dan auditor, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana maupun nasabah²³.

Di sisi lain, kompleksitas transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, hingga zakat dan dana kebajikan menuntut penyesuaian yang detail dalam pelaporan keuangan. Jika standar tidak diterapkan dengan benar, maka laporan keuangan bisa kehilangan maknanya atau bahkan menyesatkan pengguna informasi. Oleh karena itu, kesiapan SDM, sistem informasi akuntansi, serta komitmen manajemen menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi PSAK Syariah.

Lima hal yang harus diperhatikan dalam penerapan PSAK Syariah:

1. Pemahaman menyeluruh terhadap struktur dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan yang dilaporkan.
2. Penyajian komponen laporan sesuai standar PSAK Syariah, seperti laporan dana zakat dan dana kebajikan, bukan hanya laporan laba rugi atau neraca.
3. Konsistensi dan keterbandingan antar periode agar laporan dapat diinterpretasikan dengan benar dan tidak menyesatkan pengguna.
4. Kesiapan sumber daya manusia yang memahami akuntansi dan prinsip syariah, termasuk auditor internal dan eksternal.
5. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang mendukung pencatatan transaksi syariah secara akurat dan real-time.

B. Kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah

Kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah merupakan aspek penting dalam menilai keotentikan dan kepatuhan operasional bank syariah terhadap nilai-nilai Islam. Laporan keuangan idealnya tidak hanya memuat informasi finansial secara umum, tetapi juga menyertakan elemen-elemen khusus seperti laporan dana zakat, dana kebajikan,

²³ Tassallah Abdullahi, Ritambhara Singh, and Carsten Eickhoff, "Learning to Make Rare and Complex Diagnoses With Generative AI Assistance: Qualitative Study of Popular Large Language Models," *JMIR Medical Education* 10 (February 2024): e51391, <https://doi.org/10.2196/51391>.

dan pencatatan transaksi berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Studi oleh Aliya (2019) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sukarela (voluntary disclosure) yang sesuai dengan prinsip syariah terbukti meningkatkan kualitas laba, yang menjadi salah satu indikator kesesuaian dengan prinsip transparansi dalam Islam ²⁴²⁵.

Lebih lanjut, penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pelaporan keuangan juga terlihat dalam aspek Islamic Social Reporting (ISR), yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan distribusi keuangan yang adil. Hal ini diperkuat oleh penelitian Arafah & Wijayanti (2023), yang menunjukkan bahwa indikator keuangan seperti zakat performance ratio dan equitable distribution ratio secara signifikan mencerminkan kepatuhan syariah dan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

Secara umum kesesuaian laporan keuangan bank syariah dengan prinsip syariah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga menjadi cerminan tanggung jawab moral lembaga kepada masyarakat dan Tuhan. Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan, seperti tidak mencantumkannya laporan dana sosial syariah atau menyamakan perlakuan akad syariah dengan produk konvensional, dapat menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas institusi syariah ²⁶.

Kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan amanah bukan hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga dasar kepercayaan publik. Ketika laporan keuangan disusun sesuai syariah, maka bank syariah bukan hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi moral di mata masyarakat Muslim. Pelaporan yang tidak mencerminkan prinsip syariah, meskipun secara teknis sesuai akuntansi, tetap dapat merusak reputasi dan nilai-nilai institusi.

Secara lebih luas laporan keuangan yang sesuai prinsip syariah juga berfungsi sebagai alat edukatif dan akuntabilitas sosial. Masyarakat dan investor yang semakin sadar nilai-nilai etis Islam menuntut transparansi dalam hal penggunaan dana, distribusi keuntungan, serta

²⁴ Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2025a). Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices: the role of regulatory influence.

²⁵ Hana Jaradat and Mohammad Salem Oudat, "Enhancing Clarity and Transparency in Islamic Financial Practices: The Role of Regulatory Influence," *Journal of Financial Reporting and Accounting*, January 2025, <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2024-0479>.

²⁶ Mohammad Nazim Uddin et al., "Guidelines for Developing the Shari'ah-compliant Products and Shari'ah Governance for Sustainable Banks in Bangladesh," *Business Strategy & Development* 7, no. 1 (March 2024), <https://doi.org/10.1002/bsd2.309>.

alokasi dana sosial seperti zakat dan infaq penyusunan laporan tidak boleh hanya berorientasi pada angka atau laba, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai syariah yang utuh secara substansi dan format ²⁷.

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah:

1. Penyajian komponen khusus laporan syariah seperti dana zakat, dana kebajikan, dan akad syariah secara terpisah dan jelas.
2. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meninjau dan mengesahkan laporan untuk memastikan kesesuaian substantif dan formal dengan syariah.
3. Konsistensi penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengungkapan informasi, baik kepada investor maupun masyarakat umum.

C. Tantangan dalam implementasi standar akuntansi syariah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan standar akuntansi syariah (PSAK Syariah) di bank syariah Indonesia adalah belum optimalnya tingkat pengungkapan informasi akuntansi, terutama pada transaksi pembiayaan syariah. Hasil penelitian oleh Sari & Suprayogi (2022) menunjukkan bahwa tidak satu pun dari tujuh Bank Umum Syariah yang menjadi sampel sepenuhnya mematuhi standar pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSII 2013. Tingkat pengungkapan rata-rata hanya mencapai 61,6%, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran bank, usia bank, serta ukuran dewan komisaris.

Selain persoalan teknis dan struktural, tantangan implementasi juga mencakup rendahnya literasi dan pelatihan khusus bagi SDM akuntansi syariah. Banyak institusi masih mengadopsi sistem pelaporan dari akuntansi konvensional yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik unik transaksi syariah seperti mudharabah atau musyarakah. Hal ini membuat pencatatan dan pelaporan kurang akurat dan tidak merepresentasikan nilai-nilai syariah secara utuh ^{28,29}.

²⁷ Muhammad Riyadlul Jinan, Muhammad Syapiuddin, and Ulyan Nasri, "Holistic Integration: Syariah Finance Principles in Islamic Education Management," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (May 2024): 1343–50, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2243>.

²⁸ Dewi, D. K., & Dewi, M. K. (2025). Nurturing Islamic accountants: bridging the gap between practitioners' expectations and students' perspectives on Islamic accountant qualifications.

Dari sisi interpretasi, tantangan ini mencerminkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem akuntansi syariah—bukan hanya dari segi standar, tetapi juga budaya organisasi. Bank syariah harus menempatkan prinsip-prinsip syariah sebagai kerangka utama dalam pelaporan keuangan, dan bukan sekadar pelengkap administratif. Hal ini akan memperkuat nilai etis sekaligus meningkatkan daya saing institusi di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Di tingkat industri, upaya harmonisasi penerapan PSAK Syariah sangat penting untuk menghindari perbedaan interpretasi antar lembaga. Regulasi dari otoritas seperti OJK dan IAI perlu didukung dengan pedoman teknis yang lebih rinci serta forum komunikasi rutin antar bank syariah, agar implementasi standar tidak hanya seragam tetapi juga adaptif terhadap perkembangan transaksi dan kebutuhan pasar³⁰

Secara umum, tantangan dalam implementasi standar akuntansi syariah mencerminkan belum matangnya ekosistem pendukung pelaporan keuangan berbasis prinsip Islam. Kelemahan tidak hanya terletak pada aspek teknis atau kepatuhan administratif, tetapi juga pada pemahaman substansi syariah dalam aktivitas bisnis dan pelaporan keuangan. Padahal, akuntansi syariah bukan hanya soal format laporan, tetapi juga tentang mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju pelaporan keuangan syariah yang komprehensif membutuhkan pendekatan sistemik—melibatkan regulasi, pendidikan, dan teknologi informasi yang sejalan. Tanpa adanya sinergi antar pemangku kepentingan, standar akuntansi syariah hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah³¹.

Tiga tantangan utama dalam implementasi standar akuntansi syariah:

²⁹ Deti Kutsiya Dewi and Miranti Kartika Dewi, "Nurturing Islamic Accountants: Bridging the Gap between Practitioners' Expectations and Students' Perspectives on Islamic Accountant Qualifications," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, April 2025, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-0242>.

³⁰ Duwi Rahayu, Imelda Dian Rahmawati, and Aisha Hanif, "Pembentukan Model Pengakuan Sewa Yang Ideal Berdasarkan PSAK 73 Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Transportasi Di Indonesia," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1570–85.

³¹ Jaradat and Oudat, "Enhancing Clarity and Transparency in Islamic Financial Practices: The Role of Regulatory Influence."

1. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan informasi keuangan syariah, terutama pada transaksi pembiayaan dan laporan dana sosial (Sari & Suprayogi, 2022).
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip dan teknis akuntansi syariah, baik di level pelaksana maupun manajerial.
3. Kurangnya sistem informasi akuntansi yang mendukung pencatatan dan pelaporan berdasarkan akad-akad syariah secara akurat dan otomatis.

D. Perbandingan antar bank syariah dalam penerapan standar akuntansi

Penerapan standar akuntansi syariah di Indonesia menunjukkan variasi signifikan antar bank syariah, baik dari sisi kualitas pelaporan maupun tingkat pengungkapan informasi keuangan. Penelitian oleh Sari & Suprayogi (2022) mengungkap bahwa dari tujuh bank umum syariah yang diteliti, tidak ada satu pun yang sepenuhnya mematuhi ketentuan PSAK dan PAPS 2013, dengan rata-rata tingkat pengungkapan hanya mencapai 61,6%. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam ukuran bank, usia operasional, dan komposisi dewan komisaris^{32,33}.

Perbedaan tingkat penerapan juga terlihat dari pendekatan yang digunakan masing-masing bank dalam menyusun laporan keuangan. Beberapa bank syariah menerapkan pendekatan nilai tambah (*value-added approach*) dalam pelaporan keuangan, sementara yang lain menggunakan pendekatan laporan laba rugi biasa. Hal ini berdampak pada perbedaan dalam perhitungan indikator kinerja keuangan seperti ROA, ROE, dan rasio laba atas aktiva produktif (Suwanto, 2011).

Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan PSAK antar bank syariah bukan hanya mencerminkan perbedaan struktur organisasi, tetapi juga mencerminkan tingkat kesiapan teknis, kualitas manajemen, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip pelaporan syariah. Bank yang lebih besar atau lebih matang cenderung memiliki sistem yang lebih baik dalam pelaporan syariah, sementara bank yang lebih kecil

³² Abdul Rahim, M., Shahrudin, N. 'Ain S., & Mohd Suki, N. (2024). Shariah governance disclosure and its effect on Islamic banks' financial performance: evidence from Malaysia and GCC countries

³³ Memiyanty Abdul Rahim, Nur 'Ain Syahirah Shahrudin, and Norazah Mohd Suki, "Shariah Governance Disclosure and Its Effect on Islamic Banks' Financial Performance: Evidence from Malaysia and GCC Countries," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (March 2024): 619–42, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0235>.

mungkin mengalami keterbatasan dalam SDM dan teknologi pelaporan. Secara umum, perbedaan penerapan standar akuntansi syariah antar bank syariah di Indonesia mencerminkan belum meratanya pemahaman, kesiapan sistem, dan kapasitas sumber daya di masing-masing institusi³⁴. Ketimpangan ini dapat menyebabkan variasi dalam kualitas pelaporan, yang berimplikasi pada kepercayaan publik, daya saing antar bank, serta efektivitas pengawasan oleh regulator. Padahal, dalam sistem keuangan syariah, pelaporan keuangan bukan hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab etis dan spiritual lembaga keuangan kepada masyarakat dan Tuhan ³⁵.

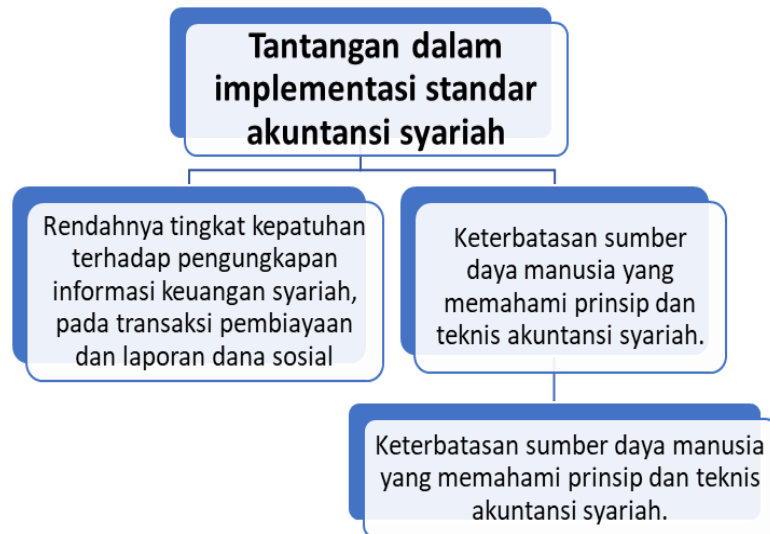
Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, diperlukan upaya harmonisasi penerapan PSAK Syariah yang lebih kuat, baik melalui kebijakan regulator maupun pembinaan institusi secara berkelanjutan. Implementasi yang seragam akan mendorong penyajian informasi keuangan yang lebih dapat dibandingkan antar bank, serta memudahkan proses audit dan evaluasi oleh pihak eksternal. Keseragaman ini juga menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor, efisiensi pasar, dan pertumbuhan industri perbankan syariah secara berkelanjutan. Empat poin dasar perbandingan penerapan PSAK Syariah antar bank syariah:

1. Tingkat kelengkapan laporan keuangan syariah, seperti penyajian laporan zakat, dana kebajikan, dan akad syariah sesuai PSAK 101–106.
2. Konsistensi pengungkapan informasi keuangan, mencakup metode pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi syariah.
3. Sistem informasi akuntansi dan teknologi pendukung, yang memengaruhi keakuratan dan kecepatan pelaporan.
4. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, termasuk pemahaman staf akuntansi terhadap prinsip dan praktik akuntansi syariah.

³⁴ M. Ihsan Zaki Nasution and Syanda Rabiatal Adawiyah, "Perbandingan Jenis Bank Syariah : Bank Umum, BPRS, Dan Unit Usaha Syariah," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 4, no. 1 (January 27, 2025): 115–26, <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3855>.

³⁵ Yana Ermawati and Novrys Suhardianto, "Accounting and Sustainability Practices Grounded in Spirituality and Ethics," *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 1 (February 2024): 13–28, <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.730>.

Gambar.1
Tantangan dan Implementasi Standar Akuntansi Syariah



Implementasi Standar Akuntansi Syariah (SAS) di Indonesia pada Bank Umum Syariah telah menjadi elemen krusial dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Penerapan standar ini memastikan bahwa pelaporan keuangan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pengakuan pendapatan, akad-akad keuangan, serta penyajian aset dan kewajiban. Regulasi dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat kepatuhan BUS terhadap SAS.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BUS di Indonesia telah mengadopsi PSAK Syariah, terutama PSAK 101 sampai PSAK 106, meskipun masih ditemukan variasi dalam penerapannya. Misalnya, beberapa bank mengalami kendala dalam menerapkan PSAK 102 (Murabahah) dan PSAK 104 (Ijarah) karena kompleksitas transaksi dan perlunya interpretasi atas kontrak akad yang digunakan (Firmansyah & Mawardi, 2023). Kendala lainnya termasuk kurangnya pelatihan teknis bagi akuntan syariah dan keterbatasan sistem informasi akuntansi yang sesuai syariah.

Di sisi lain, adopsi SAS secara penuh memberikan manfaat nyata bagi BUS, antara lain dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, menarik investor yang berorientasi syariah, serta memperkuat reputasi lembaga keuangan syariah. Sebuah studi lain

menemukan bahwa kepatuhan terhadap PSAK Syariah berdampak positif terhadap persepsi pemangku kepentingan terhadap integritas dan akuntabilitas laporan keuangan BUS. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAS bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga strategi reputasional dan bisnis.

Konsistensi implementasi SAS di seluruh BUS masih perlu ditingkatkan. Koordinasi antara OJK, DSAS, dan institusi pendidikan tinggi menjadi penting untuk menyelaraskan pemahaman teknis dan praktik akuntansi syariah. Evaluasi rutin dan penguatan literasi akuntansi syariah pada seluruh jenjang manajemen bank juga diperlukan agar SAS tidak hanya menjadi simbol kepatuhan, tetapi bagian integral dari sistem tata kelola perusahaan syariah yang berkelanjutan.

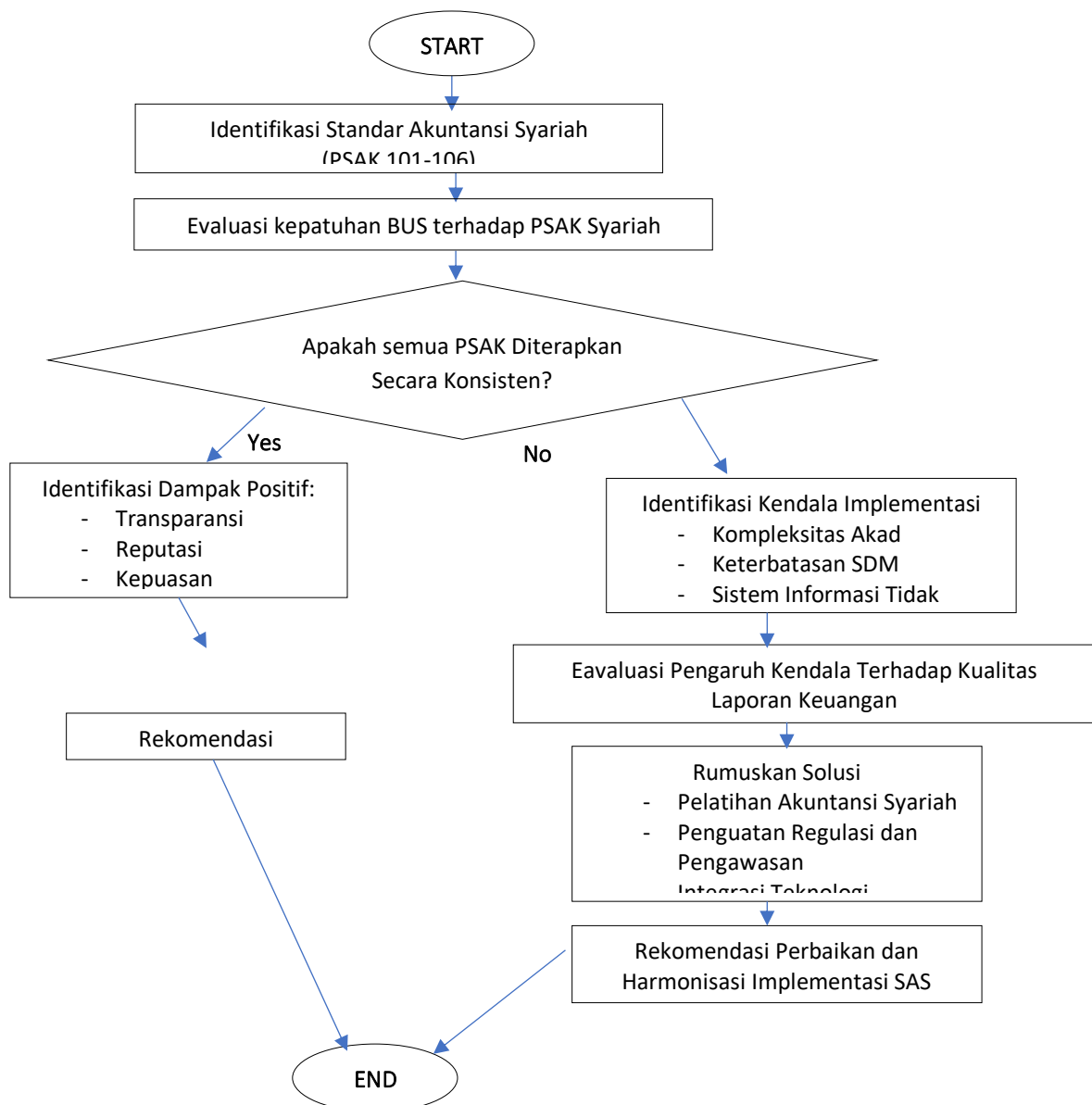
Salah satu isu strategis dalam implementasi Standar Akuntansi Syariah (SAS) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia adalah kebutuhan akan integrasi sistem informasi akuntansi yang kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak institusi perbankan syariah masih menggunakan perangkat lunak akuntansi yang berbasis sistem konvensional, sehingga memunculkan keterbatasan dalam pencatatan transaksi berbasis akad syariah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara prinsip normatif yang diatur dalam PSAK Syariah dengan praktik pelaporan keuangan aktual. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi berbasis syariah menjadi prasyarat utama untuk mendukung implementasi SAS yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SAS secara konsisten berimplikasi positif terhadap efektivitas fungsi audit, baik internal maupun eksternal, dalam BUS. Penerapan PSAK Syariah memungkinkan auditor untuk melakukan evaluasi atas transaksi keuangan secara lebih komprehensif, dengan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kelayakan substansi ekonomi transaksi. Hal ini memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks tata kelola syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat signifikan dalam menjamin kesesuaian substansi transaksi terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah. DPS berperan sebagai entitas pengawas independen yang bertanggung jawab dalam menilai, menyetujui, dan mengawasi implementasi kebijakan akuntansi syariah. Keterlibatan aktif DPS dalam proses penyusunan laporan keuangan serta dalam pengawasan

transaksi bank merupakan pilar utama dalam mendukung akuntabilitas syariah di lingkungan BUS. Keberhasilan implementasi SAS secara menyeluruh sangat ditentukan oleh komitmen kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesional, serta integrasi kurikulum akuntansi syariah di perguruan tinggi menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Bagan.1
Tahapan Kesesuaian Implementasi PSAK Bank Umum Syariah



Tahap awal dalam analisis ini adalah mengidentifikasi Standar Akuntansi Syariah yang digunakan oleh BUS. PSAK 101 sampai 106 mencakup berbagai aspek pelaporan keuangan berbasis syariah, seperti penyajian laporan keuangan (PSAK 101), pengakuan dan pengukuran akad seperti murabahah (PSAK 102), salam (PSAK 103), ijarah (PSAK 104), musyarakah (PSAK 105), dan mudharabah (PSAK 106). Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh standar yang relevan telah diperhitungkan dalam evaluasi implementasi.

Setelah standar diidentifikasi, dilakukan evaluasi apakah BUS telah menerapkan PSAK tersebut secara sesuai. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan format laporan, pengungkapan akad, pengakuan pendapatan, dan pencatatan aset serta kewajiban. Di titik ini pula diajukan pertanyaan kunci: apakah seluruh standar tersebut diterapkan secara konsisten? Ini menjadi titik cabang dalam alur analisis untuk menentukan jalur selanjutnya—apakah akan fokus pada hasil positif atau pada hambatan yang muncul.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa BUS telah secara konsisten menerapkan SAS, maka analisis diarahkan pada identifikasi manfaat implementasi. Dampak positif yang umum ditemukan antara lain meningkatnya transparansi laporan keuangan, meningkatnya reputasi bank di mata publik dan investor, serta kepuasan stakeholder atas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil ini kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi penguatan, misalnya pelatihan lanjutan, digitalisasi, atau sertifikasi syariah untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan.

Jika ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan PSAK, maka dilakukan identifikasi kendala. Hambatan yang umum adalah kompleksitas akad-akad syariah, kurangnya tenaga ahli akuntansi syariah, dan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pengaruh hambatan tersebut terhadap kualitas laporan keuangan dianalisis, untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap keandalan informasi keuangan. Tahap akhir adalah perumusan solusi, seperti pelatihan teknis, peningkatan regulasi, dan pengembangan sistem digital berbasis syariah, yang kemudian menghasilkan rekomendasi perbaikan implementasi SAS di masa depan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah (PSAK Syariah) dalam laporan keuangan bank syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek teknis, struktural, maupun pemahaman substansial terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun secara umum bank syariah telah mengadopsi PSAK Syariah, tingkat kelengkapan dan kesesuaian pelaporan masih beragam antar lembaga, terutama dalam penyajian laporan dana sosial dan akad-akad syariah. Selain itu, implementasi yang tidak merata berpotensi mengganggu kredibilitas industri perbankan syariah di mata publik dan investor.

Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sistem informasi yang mendukung, serta persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya membedakan antara bank syariah dan konvensional turut memengaruhi kualitas penerapan PSAK Syariah. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan akademisi sangat diperlukan untuk membangun sistem pelaporan syariah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Saran

1. Bank syariah perlu meningkatkan pelatihan dan literasi akuntansi syariah bagi SDM untuk memperkuat pemahaman terhadap PSAK Syariah.
2. Regulator seperti OJK dan IAI diharapkan memperkuat pengawasan dan memberikan pedoman teknis yang lebih aplikatif bagi pelaporan keuangan syariah.
3. Pengembangan sistem informasi akuntansi yang kompatibel dengan karakteristik transaksi syariah harus menjadi prioritas teknologi keuangan bank syariah.
4. Diperlukan forum rutin antar bank syariah untuk berbagi praktik terbaik dalam penerapan PSAK guna mencapai harmonisasi pelaporan.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada evaluasi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga integritas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, Memiyanty, Nur 'Ain Syahirah Shaharuddin, and Norazah Mohd Suki. "Shariah Governance Disclosure and Its Effect on Islamic Banks' Financial Performance: Evidence from Malaysia and GCC Countries." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (March 2024): 619–42. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0235>.
- Abdullahi, Tassallah, Ritambhara Singh, and Carsten Eickhoff. "Learning to Make Rare and Complex Diagnoses With Generative AI Assistance: Qualitative Study of Popular Large Language Models." *JMIR Medical Education* 10 (February 2024): e51391. <https://doi.org/10.2196/51391>.
- Ahmad Sagala, Mustofa Kamal, and Nurlaila Nurlaila. "Analisis Literatur Atas Peran Akuntansi Syariah Dalam Pengungkapan Transparansi Dan Tanggung Jawab Sosial Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jesya* 8, no. 1 (January 9, 2025): 307–17. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>.
- Aini, Zaini Nur, and Lantip Susilowati. "Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing Pada e-Commerce Indonesia." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 110–26.
- Bamhdi, Alwi M. "Analysis of Intangible Assets Reporting Standards and Automation in KSA within an Islamic Context – a Case Study." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, October 2024. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-0273>.
- Candra Susanto, Primadi, Lily Yuntina, Euis Saribanon, Josua Panatap Soehaditama, and Esti Liana. "Qualitative Method Concepts: Literature Review, Focus Group Discussion, Ethnography and Grounded Theory." *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary* 2, no. 2 (September 2024): 262–75. <https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.207>.
- Dewi, Deti Kutsiya, and Miranti Kartika Dewi. "Nurturing Islamic Accountants: Bridging the Gap between Practitioners' Expectations and Students' Perspectives on Islamic Accountant Qualifications." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, April 2025. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-0242>.
- Ermawati, Yana, and Novrys Suhardianto. "Accounting and Sustainability Practices Grounded in Spirituality and Ethics." *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 1 (February 2024): 13–28. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.730>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. "PDF, CDF, MGF, NORMAL BAKU DAN TABEL NORMAL." *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54.
- Guspendri, Nasfizar, and Nita FITRIA. "Analysis of Presentation and Reporting of Financial Transactions in the Pulau Harapan Cooperative, Agam District." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 5, no. 4 (July 2024): 780–89. <https://doi.org/10.38142/ijess.v5i4.1107>.
- Haddad, Achraf, and Mohamed Naceur Souissi. "The Impact of Shariah Advisory Board Characteristics on the Financial Performance of Islamic Banks." *Cogent Economics &*

-
- Finance* 10, no. 1 (December 2022). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2062911>.
- Hariato, Syawal. *Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. KITA Publisher, 2021.
- Idil Akbar, and Endang Wulandari. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 2 (May 12, 2023): 651–59. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.181>.
- Jaradat, Hana, and Mohammad Salem Oudat. "Enhancing Clarity and Transparency in Islamic Financial Practices: The Role of Regulatory Influence." *Journal of Financial Reporting and Accounting*, January 2025. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2024-0479>.
- Jinan, Muhammad Riyadlul, Muhammad Syapiuddin, and Ulyan Nasri. "Holistic Integration: Syariah Finance Principles in Islamic Education Management." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (May 2024): 1343–50. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2243>.
- M. Ihsan Zaki Nasution, and Syanda Rabiatal Adawiyah. "Perbandingan Jenis Bank Syariah : Bank Umum, BPRS, Dan Unit Usaha Syariah." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 4, no. 1 (January 27, 2025): 115–26. <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3855>.
- Meriç, Arzu, and Halime Karaca. "Analysis of Islamic Finance, Islamic Accounting and Standards Research." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, May 2024. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0422>.
- Muhammad, Rifqi, and Peni Nugraheni. "Sustainability of Islamic Banking Human Resources Through the Formulation of an Islamic Accounting Curriculum for Higher Education: Indonesian Perspective." *Sage Open* 12, no. 1 (January 2022). <https://doi.org/10.1177/21582440221079838>.
- Mutaufiq, Ali, Aip Zaenal Mutaqin, Nurfaedah Nurfaedah, Ana Wijandari, and others. *Pengantar Akuntansi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Oudat, Mohammad. "ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM AND FINANCIAL SUSTAINABILITY OF COMMERCIAL AND ISLAMIC BANKS: A REVIEW OF THE LITERATURE." *SSRN Electronic Journal*, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5147108>.
- Permatasari, Yani, Suham Cahyono, Amalia Rizki, Nurul Fitriani, and Khairul Anuar Kamarudin. "Accounting Background and Cross-Membership Effects on Investment Efficiency in Islamic Banks: A Study of Islamic Supervisory Board Members." *Journal of Financial Reporting and Accounting*, April 2024. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2023-0429>.
- Pratama, Rifqi Wahyu, Icksan Andhika Dharmawan, Siti Musfiroh, and Mukhlisatul Jannah. "Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)* 2, no. 2 (2024): 139–54.
- Putria, Uus, Lena Ishelmiani Ziarahah, Vinna Sri Yuniarti, and Sohifah Sohifah. "Peran Akuntansi Dan Penerapannya Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah Menuju Masyarakat

Madani." *ISLAMICA* 8, no. 1 (2024): 35–46.

Radhista Notia. "COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS (BUS) AND ISLAMIC BUSINESS UNITS (UUS) AFTER THE IMPLEMENTATION OF PSAK 401." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 11, no. 1 (April 19, 2025): 94–103. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol11.iss1.2025.2614>.

Rahayu, Duwi, Imelda Dian Rahmawati, and Aisha Hanif. "Pembentukan Model Pengakuan Sewa Yang Ideal Berdasarkan PSAK 73 Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Transportasi Di Indonesia." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1570–85.

Uddin, Mohammad Nazim, Mosharrof Hosen, Md. Abul Kalam Azad, Hatira Günerhan, Nazamul Hoque, Mahi Uddin, and Abdullahil Mamun. "Guidelines for Developing the Shari'ah-compliant Products and Shari'ah Governance for Sustainable Banks in Bangladesh." *Business Strategy & Development* 7, no. 1 (March 2024). <https://doi.org/10.1002/bsd2.309>.

Winarsih, Sri, and Ersi Sisdianto. "Peran Laporan Keuangan Dalam Menilai Transparansi Dan Keberlanjutan Bank Syariah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).